

ABSTRAK

Uni Eropa dan ASEAN bersepakat untuk menjadi mitra kerja sama strategis sebagaimana ditandai oleh ASEAN-European Union Strategic Partnership 2023-2027. Namun, Flers (2010) memandang bahwa Uni Eropa dan ASEAN memiliki perbedaan norma politik yang signifikan. Pandemi COVID-19 telah mengakselerasi kemunduran demokrasi di negara-negara anggota ASEAN. Latar belakang norma yang bertentangan tersebut mendorong penulis untuk menelusuri lebih lanjut interaksi yang terjadi antara Uni Eropa dan ASEAN. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menjawab bagaimana Uni Eropa menerapkan kekuatan normatifnya untuk membentuk keselarasan norma fundamental Uni Eropa dengan ASEAN pada tahun 2019-2024. Artikel ini menggunakan kerangka difusi norma Chen (2022) sebagai landasan konseptual. Kerangka tersebut diolah menggunakan metode penelitian analisis konten yang dikemukakan oleh Bengtsson (2016). Unit analisis tulisan ini diperoleh dari dokumen resmi dan laporan evaluasi kerja sama Uni Eropa dan ASEAN, serta artikel media terpercaya. Kemudian, unit analisis tersebut akan disusun secara manual di lembar Microsoft Excel untuk kemudian diolah dengan dekontekstualisasi, rekontekstualisasi, kategorisasi, dan kompilasi. Temuan dari proses analisis data akan disajikan dalam bentuk bagan atau tabel beserta penjelasannya. Penelitian ini menemukan bahwa difusi norma Uni Eropa dilakukan dengan menerjemahkan tiga permasalahan utama dengan lima norma pokok menjadi serangkaian perilaku. Lebih lanjut, perilaku tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi efektivitas difusi norma tersebut. Argumen utama tulisan ini adalah efektivitas difusi norma Uni Eropa di ASEAN bersifat kontekstual dan terbatas, bergantung pada isu yang difokuskan, norma yang digunakan, dan perilaku yang diterapkan.

Kata kunci: Kekuatan normatif, Uni Eropa, ASEAN, analisis konten, difusi norma

ABSTRACT

The European Union and ASEAN have agreed to become strategic cooperation partners as marked by ASEAN-European Union Strategic Partnership 2023-2027. However, Flers (2010) argues that the European Union and ASEAN have significantly different political norms. The COVID-19 pandemic has accelerated the decline of democracy in ASEAN member states. The background of conflicting norms encourages the author to further explore the interactions that occur between the European Union and ASEAN. Therefore, this paper aims to answer how the EU applies its normative power to shape the alignment of the EU's fundamental norms with ASEAN in 2019-2024. This article uses Chen's (2022) norm diffusion framework as a conceptual foundation. The framework is processed using the content analysis research method proposed by Bengtsson (2016). The unit of analysis of this paper is obtained from official documents and evaluation reports on EU and ASEAN cooperation, as well as trusted media articles. Then, the units of analysis will be compiled manually on Microsoft Excel sheets to be processed by decontextualisation, recontextualisation, categorisation, and compilation. Findings from the data analysis process will be presented in the form of charts or tables along with explanations. This research found that the diffusion of EU norms is done by translating three main issues with five core norms into a series of behaviours. Furthermore, these behaviours are analysed to identify the effectiveness of norm diffusion. The main argument of this paper is that the effectiveness of the diffusion of EU norms in ASEAN is contextual and limited, depending on the issue, norms, and behavior.

Keywords: Normative power, EU, ASEAN, content analysis, norm diffusion